



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Menteri Agama RI, Plt. Menteri Sosial RI, Menteri PPPA dan Kepala BNPB.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu 11 September 2024
Waktu	: 10.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Pembahasan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si
Hadir	: 1. 40 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Menteri dan Wakil Menteri Agama RI beserta jajaran; 3. Plt. Menteri Sosial RI beserta jajaran; 4. Menteri PPPA RI beserta jajaran; 5. Kepala BNPB beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.35 WIB. Rapat diskors pada pukul 11.40 dan dibuka kembali pukul 11.50 dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag dengan didampingi Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

KEMENTERIAN AGAMA RI

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI membahas "Penyesuaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2025 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah sebesar Rp79.168.712.137.000,- (*tujuh puluh sembilan triliun seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) yang mengalami penambahan sebesar Rp1.150.000.000.000,00 (*satu triliun seratus lima puluh miliar rupiah*), untuk memenuhi sebagian usulan kebutuhan tambahan anggaran pada fungsi agama dan pendidikan, pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau *Quick Win* berupa revitalisasi satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, dengan rincian berdasarkan Unit Eselon I sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Pagu Anggaran 2025 (dalam ribu rupiah)
1	Sekretariat Jenderal	35.331.813.673
2	Inspektorat Jenderal	178.614.005
3	Ditjen Bimas Islam	2.367.743.475
4	Ditjen Pendidikan Islam	36.203.709.415
5	Ditjen Bimas Kristen	1.014.509.461
6	Ditjen Bimas Katolik	473.177.491
7	Ditjen Bimas Hindu	619.075.847
8	Ditjen Bimas Buddha	326.577.011
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.565.037.969
10	Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM	651.640.793
11	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	436.812.997
Total		79.168.712.137

2. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI agar dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025 meningkatkan capaian program yang dirasakan langsung oleh masyarakat disertai pengawasan internal yang lebih optimal guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas.

KEMENTERIAN SOSIAL RI

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dengan agenda pembahasan "Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2025 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah sebesar Rp79.588.005.512.000,00 (*tujuh puluh sembilan triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah*), yang mengalami penambahan sebesar Rp2.400.000.000.000,00 untuk kelanjutan program permakanan Lansia, Disabilitas Tunggal, dan Atensi Yatim Piatu, dengan rincian berdasarkan Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

No.	Unit Kerja Eselon I	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	643.575.933.000
2	Inspektorat Jenderal	43.259.329.000
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	44.449.702.424.000
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	3.733.370.055.000
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	30.718.097.771.000
Total		79.588.005.512.000

2. Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial RI sebesar Rp7.213.495.798.950 (*tujuh triliun dua ratus tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) untuk usulan tambahan anggaran yang belum terpenuhi dalam pagu anggaran Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2025.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI agar dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 dapat bekerja efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan mengatasi masalah-masalah kerentanan sosial.

KEMENTERIAN PPPA RI

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan agenda membahas “**Penyesuaian RKA-KL Tahun Anggaran 2025 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah**” disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun Anggaran 2025, sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, sebesar Rp300.654.181.000,- (*tiga ratus miliar enam ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah*) dengan rincian per unit kerja sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

No	Satuan Kerja	Rincian Pagu Tahun 2025			
		Operasional	Non Operasional		Jumlah
			Prioritas Nasional	Non Prioritas Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
1	Sekretariat Kementerian	124.386.040	1.820.000	25.187.634	151.393.674
2	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	2.275.000	32.081.448	3.500.000	37.856.448
3	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	2.085.798	25.562.681	2.761.644	30.410.123
4	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	2.112.982	25.445.378	3.450.000	31.008.360
5	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2.271.404	28.098.040	2.600.000	32.969.444
6	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	9.271.623	4.930.000	2.814.509	17.016.132
Jumlah		142.402.847	117.937.547	40.313.787	300.654.181

2. Komisi VIII DPR RI mendukung:
- DAK Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2025 sebesar Rp132.000.000.000,- (*seratus tiga puluh dua miliar*) yang ditujukan untuk 304 daerah penerima.
 - DAK Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK Fisik PPA) sebesar Rp96.961.090.487,- (*sembilan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) untuk 42 daerah penerima.

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian regulasi turunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama kehidupan

KEPALA BNPB

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan agenda membahas "**Penyesuaian RKA-KL Tahun Anggaran 2025 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah**" disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Komisi VIII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah sebesar Rp1.427.574.663.000,- (*satu triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar juta lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), yang mengalami penambahan sebesar Rp500.000.000.000,- (*lima ratus miliar rupiah*) dari pagu anggaran sebelumnya, yang akan dialokasikan untuk penyediaan logistik dan sarpras penanganan bencana di daerah, dengan rincian per unit kerja sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Program Dukungan Manajemen	376.396.339.000
1.1	Sekretariat Utama	354.474.439.000
1.2	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	9.921.900.000
1.3	Inspektorat Utama	12.000.000.000
2	Program Ketahanan Bencana	1.051.178.324.000
2.1	Deputi Bidang Sistem dan Strategi	15.042.000.000
2.2	Deputi Bidang Pencegahan	57.511.764.000
2.3	Deputi Bidang Penanganan Darurat	260.924.000.000

2.4	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	20.488.000.000
2.5	Deputi Bidang Logistik dan Peralatan	475.812.000.000
2.6	Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan	76.741.399.000
2.7	Pusat Pengendalian Operasi	144.659.161.000
Total		1.427.574.663.000

2. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB agar dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 meningkatkan kinerja maksimal dalam melakukan penanggulangan bencana melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.45 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.